



# PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN**  
**KABUPATEN KEDIRI**  
**2021**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kediri dalam bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan, telah dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri tahun 2021.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja ini adalah untuk memberikan arahan/ panduan bagi Kepala Bidang dan pelaksana teknis kegiatan-kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri agar sesuai dengan perencanaan yang dilakukan dan tupoksi masing-masing serta dapat menjadi panduan/ pedoman bagi pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi yang akan dilaporkan di setiap akhir tahun dalam bentuk LKjIP dan LKPJ.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri tahun 2021 ini dan untuk lebih sempurna diharapkan saran dan pendapat untuk perbaikannya.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kediri,        -        - 2021

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PETERNAKAN KABUPATEN KEDIRI



**TUTIK PURWANINGSIH**

Pembina Tk. I

NIP. 19740807 200312 2 004

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.. .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.....	8
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD .....	23
BAB IV. PENUTUP .....	34

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Capaian Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan RPJMD 2021-2026 dan Tujuan Renstra Perangkat Daerah .....	8
Tabel 2.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	9
Tabel 2.3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 .....	10
Tabel 3.1. Ringkasan Rencana Perubahan Anggaran Belanja Tahun 2021 .....	23
Tabel 3.2. Rencana Program dan Kegiatan SKPD pada Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2021 .....	25

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun ke- n+1, sedangkan Perubahan Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUPA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) tahun 2021.
3. Rencana Kerja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja SKPD selama 1 (satu) tahun.



Rencana Kerja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah dalam kurun waktu tersingkat. Rencana Kerja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD menentukan kualitas pelayanan publik, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain sebagai berikut :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun n-1 dan mengacu RKPD tahun n.
2. Program dalam Renja SKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun n.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sejalan dengan Misi Pembangunan ke-2 Pemerintah Kabupaten Kediri yakni “Mempercepat Pembangunan di Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan untuk Memperkuat Kemandirian Masyarakat Menuju Swasembada Pangan”, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri menyusun Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2021. Selanjutnya Perubahan Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUPA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD).

## **1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 34).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri Tahun 2021 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan dokumen perencanaan untuk tahun 2021 di bidang ketahanan pangan dan peternakan sebagai salah satu sektor pendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Kediri.

Adapun maksud penyusunan Perubahan RENJA Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. memberi arah dan pedoman kepada setiap aparatur di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri dalam menjalankan program selama tahun 2021 untuk mencapai visi dan misi yang telah dirumuskan;
2. menjadikan rencana kerja sebagai acuan utama dalam pelaksanaan program yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri di tahun 2021;
3. merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan atau memantau pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri pada tahun 2021.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. memberikan acuan dan arahan bagi jajaran birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan bidang ketahanan pangan dan peternakan di tahun 2021 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan bersinergi baik di dalam maupun antar sektor dan sub sektor terkait;
2. memberikan pilihan-pilihan kebijakan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan urusannya dan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis;
3. memasukkan program/kegiatan yang ada di Perubahan Renja ke dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun 2021.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

#### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD**

#### **BAB IV PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Secara umum pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II tahun 2021 ditampilkan pada tabel 2.1 dan 2.2.

**Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan RPJMD 2021-2026  
dan Tujuan RENSTRA SKPD**

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SESUAI RPJMD TAHUN 2016-2021	Triwulan II 2021		Sumber Data
		Target	Realisasi	
1.	Rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk (kg/kapita/tahun)	141,80	*)	DKPP
2.	Produksi peternakan (ton)			DKPP
	- daging	19.608	5.168	
	- telur	73.481	16.659	

Realisasi capaian indikator kinerja pembangunan daerah sesuai tujuan RPJMD tahun 2021-2026 dan tujuan RENSTRA SKPD belum dapat diketahui secara keseluruhan pada triwulan II karena data diperoleh dan dianalisis pada akhir tahun 2021. Namun begitu terus dilakukan upaya pendukung keberhasilan antara lain :

1. peningkatan ketersediaan, akses dan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat;
2. pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM);
3. optimalisasi pekarangan melalui konsep Pekarangan Pangan Lestari (P2L);
4. peningkatan keamanan pangan segar;
5. pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman dan pengembangan pangan lokal;
6. pengembangan peternakan berwawasan agribisnis dan pembinaan SDM peternak dan kelompok ternak;
7. optimalisasi inseminasi buatan melalui program SI KOMANDAN, pengendalian penyembelihan betina produktif dan penanganan gangguan reproduksi ternak; dan
8. pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak.

Tabel 2.2

## Capaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR	TAHUN			
		2019	2020	2021	
				Target	Realisasi
<b>A</b>	<b>Meningkatnya ketersediaan dan akses pangan yang aman</b>				
1	Ketersediaan energi dan protein (kkal dan gram/kapita/hari)	5.436,14 dan 122,39	5.845,75 dan 137,01	2400 dan 63	*)
<b>B</b>	<b>Meningkatnya populasi ternak</b>				-
1	Jumlah Populasi Ternak (ekor)				
	- sapi potong	232.567	232.802	233.035	233.099
	- sapi perah	10.774	10.786	10.797	10.807
	- kambing	144.718	145.565	146.147	145.873
	- domba	48.541	49.306	49.799	51.277
	- ayam buras	1.361.428	1.259.357	1.271.951	1.244.142

Capaian indikator kinerja DKPP pada tahun 2021 per triwulan II berdasarkan sasaran yang hendak dicapai dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Meningkatnya ketersediaan dan akses pangan yang aman

Ketersediaan energi dan protein menggambarkan jumlah energi dan protein yang tersedia bagi tiap orang penduduk di Kabupaten Kediri per hari. Target ketersediaan energi dan protein per kapita per hari tahun 2020 adalah sebesar 2.400 kkal/kapita/hari dan 63 gram/kapita/hari. Sedangkan realisasi yang dicapai pada tahun 2020 adalah sebesar 5.845,75 kkal/kapita/hari dan 137,01 gram/kapita/hari. Ini berarti terjadi surplus energi sebesar 3.445,75 kkal/kapita/hari dan surplus protein sebesar 74,01 gram/kapita/hari. Pada tahun 2021, ditargetkan ketersediaan energi dan protein per kapita sebesar 2.400 kkal/kapita/hari dan 63 gram/kapita/hari. Pada triwulan II tahun 2021, angka ketersediaan energi dan protein belum dapat diketahui. Ini dapat dihitung setelah data produksi pangan utama dan data jumlah penduduk Kabupaten Kediri tahun 2021 diperoleh dan dianalisis pada akhir tahun.

### 2. Meningkatnya populasi ternak

Jumlah populasi ternak yang dihitung pada tahun 2021 adalah sapi potong, sapi perah, kambing, domba dan ayam buras. Sampai dengan triwulan II tahun 2021, jumlah populasi sapi potong sebanyak 233.099 ekor atau tercapai 100,03% dari target 2021 yang ditetapkan sebanyak 233.035 ekor. Populasi sapi perah sebanyak 10.807 ekor atau tercapai 100,09% dari target tahun 2021 (10.797 ekor). Populasi kambing sebanyak 145.873 ekor atau tercapai 99,81% dari target tahun 2021 (146.147 ekor). Untuk domba, populasinya sebanyak 51.277 ekor, tercapai 102,97% dari target tahun 2021 yaitu sebanyak 49.799 ekor. Sedangkan populasi ayam buras per triwulan II tahun 2021 sebanyak 1.244.142 ekor atau tercapai 97,81% dari target tahun 2021 yang sebanyak 1.271.951 ekor.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri sampai dengan Triwulan II tahun 2021 disajikan dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3

## REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri

No.	KODE REKENING	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016-2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi 2021		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah (Penanggung Jawab)	KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
I	2.09	Usuran Wajib non Pelayanan Dasar/ Bidang Urusan Pangan																										
	2.09.01	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	9.584.382.053			100 %	9.584.382.053	100 %	1.212.290.1740	100 %	2.957.280.7333					100 %	43,73 %	100 %	43,73 %							
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100 %	16.417.560			100 %	16.417.560	100 %	0	100 %	7.846.410					100 %	47,79 %	100 %	47,79 %							
	2.09.01.2.01.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	5 dokumen	11.246.410			5 dokumen	11.246.410		0	2 dokumen	7.846.410					40 %	69,77 %	2 dokumen	7.846.410	40,00 %	69,77 %					
	2.09.01.2.01.07	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	3 dokumen	5.171.150			3 dokumen	5.171.150		0	dokumen	0					0 %	0,00 %	0 dokumen	0	0,00 %	0,00 %					
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	8.297.130.758			100 %	8.297.130.758	100 %	1.170.390.8701	100 %	2.832.570.2110					100 %	48,25 %		4.002.970.811							
	2.09.01.2.02.01	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	16 OB 38	7.315.401.288			1.6 OB 38	7.315.401.288		3 OB 84	1.091.921.1054	5 OB 2.582.023.432					54,70 %	50,22 %	89 OB 6	3.673.944.486	54,70 %	50,22 %					
	2.09.01.2.02.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen pelaksanaan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	40 dokumen	702.537.970			40 dokumen	702.537.970		1 dokumen 0	78.477.647	1 dokumen 119.848.678					50,00 %	28,23 %	20 dokumen	198.326.325	50,00 %	28,23 %					



2.09.01.2.02.03	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang diberikan honorarium	12 0	OB	273.708.000		12 0	OB	273.708.000	3 0	OB	0	3 0	OB	130.700.000				60 0	OB	130.700.000	50,00 %	47,7 5%	60 0	OB	130.700.000	50,00 %	47,75 %	DKPP	
2.09.01.2.02.05	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	2	laporan	1.999.500		2	laporan	1.999.500		laporan	0		laporan	0				0	laporan	0	0,00 %	0,00 %	0	laporan	0	0,00 %	0,00 %	DKPP	
2.09.01.2.02.05	5	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang disusun	2	dokumen	3.484.000		2	dokumen	3.484.000		dokumen	0		dokumen	0				0	dokumen	0	0,00 %	0,00 %	0	dokumen	0	0,00 %	0,00 %	DKPP	
2.09.01.2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	10 0	%	15.644.000		10 0	%	15.644.000	1 0 0	%	0	1 0 0	%	3.040.000				10 0	%	3.040.000	100 %	19,4 3%	10 0	%	3.040.000	100,0 0%	19,43 %		
2.09.01.2.03.06	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pejabat penatausahaan barang dan pengurus barang yang diberikan honorarium	2	orang	15.644.000		2	orang	15.644.000		orang	0	2	orang	3.040.000				2	orang	3.040.000	100 %	19,4 3%	2	orang	3.040.000	100,0 0%	19,43 %	DKPP	
2.09.01.2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	10 0	%	18.860.000		10 0	%	18.860.000	1 0 0	%	0	1 0 0	%	2.890.000				10 0	%	2.890.000	100 %	15,3 2%	10 0	%	2.890.000	100,0 0%	15,32 %		
2.09.01.2.05.09	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti aparatur	5	kegiatan	18.860.000		5	kegiatan	18.860.000		kegiatan	0	3	kegiatan	2.890.000				3	kegiatan	2.890.000	60,00 %	15,3 2%	3	kegiatan	2.890.000	60,00 %	15,32 %	DKPP	
2.09.01.2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum PD</b>	10 0	%	768.410.010		10 0	%	768.410.010	1 0 0	%	26.303.040	1 0 0	%	84.722.012				10 0	%	111.025.052	100 %	14,4 5%	10 0	%	111.025.052	100,0 0%	14,45 %		
2.09.01.2.06.01	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dokumen pelaksanaan penyediaan instalasi listrik dan penerangan	4	dokumen	21.048.830		4	dokumen	21.048.830		1	dok	0	1	dok	9.799.240				2	dok	9.799.240	50,00 %	46,5 5%	2	dok	9.799.240	50,00 %	46,55 %	DKPP

2.09.01.2.06.02		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dan dipelihara	11 3 unit	181.903.770		11 3 unit	181.903.770	2 unit	3.960.000	unit	0				2 unit	3.960.000	1,77%	2,18%	2 unit	3.960.000	1,77%	2,18%	DKPP	
2.09.01.2.06.03		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	95 unit	188.527.420		95 unit	188.527.420	1 5 unit	10.494.990	7 unit	21.499.500				22 unit	31.994.490	23,16%	16,97%	22 kali	31.994.490	23,16%	16,97%	DKPP	
2.09.01.2.06.04		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah rapat koordinasi, rapat staf dan rapat dinas yang dilaksanakan	48 kali	147.156.000		48 kali	147.156.000	3 kali	3.657.000	2 kali	37.524.000				23 kali	41.181.000	47,92%	27,98%	23 kali	41.181.000	47,92%	27,98%	DKPP	
2.09.01.2.06.05		5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 dokumen	69.663.990		12 dokumen	69.663.990	3 dok	3.470.000	3 dok	4.915.000				6 dok	8.385.000	50%	12,04%	6 dok	8.385.000	50,00%	12,04%	DKPP	
2.09.01.2.06.06		6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	11 19 eksemplar	3.828.000		11 19 eksemplar	3.828.000	2 7 9 eks	490.000	2 7 9 eks	735.000				55 8 eksemplar	1.225.000	49,87%	32,00%	55 8 eksemplar	1.225.000	49,87%	32,00%	DKPP	
2.09.01.2.06.09		7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi kelembagaan di dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	35 kali	156.282.000		35 kali	156.282.000	1 kali	4.231.050	4 kali	10.249.272				40 kali	14.480.322	11,43%	9,27%	40 kali	14.480.322	11,43%	9,27%	DKPP	
2.09.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	200.000.000		100%	200.000.000	0%	0	0%	0				0%	0,00%	0,00%	100%	0	100%	0			
2.09.01.2.07.09		1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah kanopi gedung kantor yang diadakan	1 unit	200.000.000		1 unit	200.000.000	unit	0	unit	0				0 unit	0	0%	0,00%	0 unit	0	0,00%	0,00%	DKPP	

2.09.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	215.119.725			100 %	215.119.725	100 %	15.589.999	100 %	4.600.000					100 %	41.871.193	100%	19,46%	100 %	41.871.193	100%	19,46%		
2.09.01.2.08.01	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen pelaksanaan penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 dokumen	2.322.500			4 dokumen	2.322.500	1 dok	240.000	1 dok	93.000					2 dok	333.000	50,00 %	14,34%	2 dok	333.000	50,00 %	14,34%	DKPP	
2.09.01.2.08.02	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dokumen pelaksanaan penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 dokumen	187.797.225			12 dokumen	187.797.225	3 dok	15.349.999	3 dok	26.188.194					6 dok	41.538.193	50,00 %	22,12%	6 dok	41.538.193	50,00 %	22,12%	DKPP	
2.09.01.2.08.04	3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa publikasi yang digunakan	5 kali	25.000.000			5 kali	25.000.000		0		0					0 kali	0	0,00 %	0,00 %	0 kali	0	0,00 %	0,00 %	DKPP	
2.09.01.2.08			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	52.800.000			100 %	52.800.000	0 0	0	100 %	21.616.801					100 %	21.616.801	100%	40,94%	100 %	21.616.801	100,00%	40,94%		
2.09.01.2.08.01	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dokumen pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional serta penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	4 dokumen	32.800.000			4 dokumen	32.800.000	dok	0	2 dok	1.616.801					2 dok	1.616.801	50,00 %	4,93%	2 dok	1.616.801	50,00 %	4,93%	DKPP	
2.09.01.2.08.09	2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	20.000.000			1 unit	20.000.000	unit	0	1 unit	20.000.000					1 unit	20.000.000	100%	100 %	1 unit	20.000.000	100,00%	100,00%	DKPP	
Rata-rata capaian kinerja (%)											100,00%	12,65%	100,00%	30,86%					100,00%	43,73%	100,00%	43,73%	100%	43,73%	100,00%	43,73%		
Predikat kinerja											ST	SR	ST	SR					ST	SR	ST	SR	ST	SR	ST	SR		

2.09.01	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah rumusan kebijakan infrastruktur kemandirian pangan yang tersusun	1 rumusan	51.086.000			1 rumusan	51.086.000	0 rumusan	0	0 rumusan	4.600.000				0 rumusan	4.600.000	0,00%	9,00%	0 rumusan	4.600.000	0,00%	9,00%		
2.09.01.2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah bahan rumusan kebijakan infrastruktur kemandirian pangan yang tersedia	4 bahan	51.086.000			4 bahan	51.086.000	bahan	0,00	1 bahan	4.600.000				1 bahan	4.600.000	25,00%	9,00%	1 bahan	4.600.000	25,00%	9,00%		
2.03.01.16.64	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah rapat dan sidang penyusunan rumusan kebijakan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan	4 kali	51.086.000			4 kali	51.086.000	kali	0	kali	4.600.000				0 kali	4.600.000	0,00%	9,00%	0 kali	4.600.000	0,00%	9,00%	DKPP	
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00%	0,00%	0,00%	9,00%				0,00%	9,00%	0,00%	9,00%	0,00%	9,00%				
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR				SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR			
2.09.03	3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Koefisien variasi harga pangan utama	10 %	653.402.650			10 %	653.402.650	1 %	17.191.300	1 %	143.022.500				10 %	172.281.400	100,00%	26,37%	10 %	172.281.400	100,00%	26,37%		
			Skor Pola Pangan Harapan	94,4				94,4																		
			Jumlah cadangan pangan masyarakat	10 ton				10 ton																		
2.09.03.2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah penyaluran pangan pokok ke Toko Tani Indonesia	20 ton	231.753.800			20 ton	231.753.800	5 ton	17.191.300	5 ton	63.495.000				10 ton	80.686.300	50,00%	34,82%	10 ton	80.686.300	50,00%	34,82%		
2.09.03.2.01.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah petugas survey harga dan NBM yang diberikan pelatihan	26 orang	100.655.500			26 orang	100.655.500	orang	12.568.000	2 orang	17.810.000				26 orang	30.378.000	100,00%	30,18%	26 orang	30.378.000	100,00%	30,18%	DKPP	

2.09.03.2.01.02		2	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah anggota poktan/gapoktan yang diberikan pelatihan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat	12 orang 0	131.098.300		12 orang 0	131.098.300	orang	4.623.300	6 orang 0	45.685.000				60 orang	50.308.300	50,00%	38,37%	60 orang	50.308.300	50,00%	38,37%	DKPP		
2.09.03.2.02			<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah lumbung pangan yang dikelola masyarakat</b>	11 unit	111.415.250		11 unit	111.415.250	unit	0	1 unit 1	79.527.500				11 unit	79.527.500	100,00%	71,38%	11 unit	79.527.500	100%	71,38%			
2.09.03.2.02.01		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan pengembangan ketersediaan dan cadangan pangan	17 orang 0	111.415.250		17 orang 0	111.415.250	orang	0	1 orang 2 0	79.527.500				12 orang 0	79.527.500	70,59%	71,38%	12 orang 0	79.527.500	70,59%	71,38%	DKPP		
2.09.03.2.04			<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan B2SA</b>	5 unit	310.233.600		5 unit	310.233.600	unit	0,00	1 unit	12.067.600				1 unit	12.067.600	20,00%	3,89%	1 unit	12.067.600	20,00%	3,89%			
2.09.03.2.04.02		1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakkan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok yang mendapatkan program P2L DAK Non Fisik ; Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakkan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	16 orang 0	310.233.600		16 orang 0	310.233.600	orang	0		orang	12.067.600				0 orang	12.067.600	0,00%	3,89%	0 orang	12.067.600	0,00%	3,89%	DKPP	
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										100,00%	2,63%	100,00%	21,89%				100,00%	26,37%	100,00%	26,37%	100,00%	26,37%	100,00%	26,37%			
<b>Predikat kinerja</b>										ST	SR	ST	SR				ST	SR	ST	SR	ST	SR	ST	SR			

2.09.04	4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah penangan desa rentan pangan	3 desa	92.734.750		3 desa	92.734.750	desa	5.440.000	1 desa	9.440.000				1 desa	14.880.000	33,33%	16,05%	1 desa	14.880.000	33,33%	16,05%		
2.09.04.2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah event penanganan desa rentan pangan yang dilaksanakan	2 unit	92.734.750		2 unit	92.734.750	unit	5.440.000	1 unit	9.440.000				1 unit	14.880.000	50,00%	16,05%	1 unit	14.880.000	50,00%	16,05%		
2.09.04.2.02.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan pencegahan dan penanganan kerawanan pangan	80 orang	92.734.750		80 orang	92.734.750	orang	5.440.000	orang	9.440.000				0 orang	14.880.000	0,00%	16,05%	0 orang	14.880.000	0,00%	16,05%	DKPP	
Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00%	5,87%	33,33%	10,18%				33,33%	16,05%	33,33%	16,05%	33,33%	16,05%	33,33%	16,05%		
Predikat kinerja									SR	SR	SR	SR				SR	R	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	
2.09.05	5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase keamanan pangan segar	70 %	377.098.000		70 %	377.098.000	%	68.418.000	%	68.608.100				0 %	137.026.100	0,00%	36,34%	0 %	137.026.100	0,00%	36,34%		
2.09.05.2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pangan segar yang diberikan pengawasan keamanan pangan	200 orang	377.098.000		200 orang	377.098.000	80 orang	68.418.000	64 orang	68.608.100				144 orang	137.026.100	72,00%	36,34%	144 orang	137.026.100	72,00%	36,34%		
2.09.03.2.01.01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah pelaku usaha pangan segar yang mendapatkan pelatihan keamanan pangan segar	80 orang	71.443.000		80 orang	71.443.000	80 orang	65.918.000	orang	0				80 orang	65.918.000	100,00%	92,27%	80 orang	65.918.000	100,00%	92,27%	DKPP	
2.09.03.2.01.02	2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah pelaku usaha pangan segar yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi sertifikasi keamanan pangan segar	50 orang	169.495.000		50 orang	169.495.000	orang	2.500.000	50 orang	19.601.000				50 orang	22.101.000	100%	13,04%	50 orang	22.101.000	100,00%	13,04%	DKPP	



2.09.03.2.01.01		3	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pangan segar yang diuji	30 sampel	92.160.000		30 sampel	92.160.000	samp el	0	samp el	6.480.000				0 sampel	6.480.000	0,00%	7,03%	0 sampel	6.480.000	0,00%	7,03%	DKPP	
2.09.03.2.01.02		4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat rapid test kit keamanan pangan segar yang diadakan	1 paket	44.000.000		1 paket	44.000.000	paket	0	1 paket	42.527.100				1 paket	42.527.100	100,00%	96,65%	1 paket	42.527.100	100,00%	96,65%	DKPP	
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00%	18,14%	0,00%	18,19%				0,00%	36,34%	0,00%	36,34%	0,00%	36,34%	0,00%	36,34%		
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR				SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR		
II	3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																								
3.27.02		1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah SPR yang terbentuk	8 SPR	8.309.978.420		8 SPR	8.309.978.420	4 SPR	169.819.660	SPR	151.498.335				4 SPR	321.317.995	50,00%	3,87%	4 SPR	321.317.995	50%	3,87%		
3.27.02.2.01			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan Pengawasan Sarana Pertanian	100%	5.573.080.000		100%	5.573.080.000	100%	12.659.850	100%	2.400.000				100%	15.059.850	100%	0,27%	100%	15.059.850	100%	0,27%		
3.27.02.2.01.01		1	Pengawasan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung peternakan yang dilaksanakan; Jumlah peternak yang mendapatkan bansos stimulus	1901 unit	5.573.080.000		1901 unit	5.573.080.000	1 unit	12.659.850	1 unit	2.400.000				2 unit	15.059.850	0,11%	0,27%	2 unit	15.059.850	0,11%	0,27%	DKPP	
3.27.02.2.02			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan	100%	2.652.183.020		100%	2.652.183.020	100%	109.199.810	100%	145.258.335				100%	254.458.145	100,00%	9,59%	100%	254.458.145	100%	9,59%		

3.27.02.2.02.02		1	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah kelompok yang menerima hibah peningkatan kualitas SDG Hewan; Jumlah pelatihan peningkatan kualitas SDG hewan yang dilaksanakan	39 unit	2.386.559.490		39 unit	2.386.559.490	3 unit	74.459.810	4 unit	99.378.335					7 unit	173.838.145	17,95 %	7,28 %	7 unit	173.838.145	17,95 %	7,28 %	DKPP	
3.27.02.2.02.03		1	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah event dalam rangka Pemanfaatan SDG Hewan yang dilaksanakan	3 unit	265.623.530		3 unit	265.623.530	1 unit	34.740.000	1 unit	45.880.000					2 unit	80.620.000	66,67 %	30,35 %	2 unit	80.620.000	66,67 %	30,35 %	DKPP	
3.27.02.2.03			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan/ pelatihan peningkatan mutu pakan dan produksi peternakan	40 orang	84.715.400		40 orang	84.715.400	4 orang	47.960.000	orang	3.840.000					40 orang	51.800.000	100,00 %	61,15 %	40 orang	51.800.000	100 %	61,15 %		
3.27.02.2.03.01		1	Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah kegiatan pengawasan dan peningkatan mutu pakan yang dilakukan	3 unit	84.715.400		3 unit	84.715.400	1 unit	47.960.000	1 unit	3.840.000					2 unit	51.800.000	66,67 %	61,15 %	2 unit	51.800.000	66,67 %	61,15 %	DKPP	
Rata-rata capaian kinerja (%)										50,00%	2,04%	0,00%	1,82%				50,00%	3,87%	50,00 %	3,87 %	50,00%	3,87%	50,00 %	3,87 %			
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR				SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR			
3.27.03		1	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan pemanfaatan prasarana peternakan dan kesehatan hewan yang tersedia	10 %	763.369.900		10 %	763.369.900	1 %	0	1 %	4.970.000				10 %	24.622.900	100,00 %	3,23 %	10 %	24.622.900	100 %	3,23 %			
3.27.03.2.02			Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun	3 unit	741.077.000		3 unit	741.077.000	0 unit	0	1 unit	4.970.000				1 unit	4.970.000	33,33 %	0,67 %	1 unit	4.970.000	33,33 %	0,67 %			

3.27.03.2.02.07		1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah prasarana dan peralatan RPH yang diadakan	22 unit	599.077.000		22 unit	599.077.000	unit	0	2 unit	4.970.000				2 unit	4.970.000	9,09 %	0,83 %	2 unit	4.970.000	9,09 %	0,83 %	DKPP	
3.27.03.2.02.08		2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pendukung peternakan yang dibangun	2 unit	142.000.000		2 unit	142.000.000	unit	0	unit	0				0 unit	0	0,00 %	0,00 %	0 unit	0	0,00 %	0,00 %	DKPP	
3.27.03.2.04			Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah kelompok ternak yang mendapatkan pelatihan/pembinaan/pengembangan ternak	2 kelompok	22.292.900		2 kelompok	22.292.900	kel	0	2 kel	19.652.900				2 kel	19.652.900	100,00 %	88,16 %	2 kel	19.652.900	100 %	88,16 %		
3.27.03.2.04.03		1	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan / pembinaan pengembangan ternak	40 orang	22.292.900		40 orang	22.292.900	orang	0	4 orang	19.652.900				40 orang	19.652.900	100,00 %	88,16 %	40 orang	19.652.900	100,00 %	88,16 %	DKPP	
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00%	0,00%	100,00%	0,65%				100,00%	3,23%	100,00%	3,23%	100,00%	3,23%	100,00%	3,23%		
Predikat kinerja										ST	SR	ST	SR				ST	SR	ST	SR	ST	SR	ST	SR		
3.27.04		1	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penanganan kasus penyakit hewan	100 %	1.092.939.425		100 %	1.092.939.425	100 %	161.055.480	100 %	316.316.045				100 %	483.371.525	100,00 %	44,23 %	100 %	483.371.525	100 %	44,23 %		
				Jumlah unit usaha produk hewan yang tersertifikasi NKV	5 unit			5 unit								0 unit		0,00 %		0 unit						
3.27.04.2.01			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kasus penyakit hewan menular pada ternak yang terdeteksi	12 kasus	223.968.790		12 kasus	223.968.790	kasus	52.742.480	kasus	105.210.750				0 kasus	157.953.230	0,00 %	70,52 %	0 kasus	157.953.230	0,00 %	70,52 %		

3.27.04.2.01.01		1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah peternak yang diberikan bimtek peningkatan kesehatan hewan	90 orang	223.968.790		90 orang	223.968.790	30 orang	52.742.480	60 orang	105.210.750				90 orang	157.953.230	100,00%	70,52%	90 orang	157.953.230	100,00%	70,52%	DKPP	
3.27.04.2.02			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Produk Asal Hewan yang lolos uji mikroba	70 %	23.469.700		70 %	23.469.700	%	0	%	1.780.000				0 %	1.780.000	0,00%	7,58%	0 %	1.780.000	0,00%	7,58%		
3.27.04.2.02.02		1	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah peserta sosialisasi Produk Asal Hewan	40 orang	23.469.700		40 orang	23.469.700	orang	0	orang	1.780.000				0 orang	1.780.000	0,00%	7,58%	0 orang	1.780.000	0,00%	7,58%	DKPP	
3.27.04.2.03			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan terpadu	2.600 ekor	611.828.755		2.600 ekor	611.828.755	334 ekor	78.647.200	745 ekor	175.390.295				1.079 ekor	254.037.495	41,50%	41,52%	1.079 ekor	254.037.495	41,50%	41,52%		
3.27.04.2.03.01		1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah perlengkapan labkeswan yang diadakan	3 paket	61.491.025		3 paket	61.491.025	3 paket	58.131.025	0 paket	0				3 paket	58.131.025	100,00%	94,54%	3 paket	58.131.025	100,00%	94,54%	DKPP	
3.27.04.2.03.02		1	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan medik veteriner yang dilaksanakan	3 unit	550.337.730		3 unit	550.337.730	1 unit	20.516.175	1 unit	175.390.295				2 unit	195.906.470	66,67%	35,60%	2 unit	195.906.470	66,67%	35,60%	DKPP	

3.27.04.2.04			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pelaku usaha Produk Asal Hewan yang mendapatkan pembinaan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesmavet	15 orang	144.436.290			15 orang	144.436.290	5 orang	25.665.800	5 orang	33.935.000					10 orang	59.600.800	72,00 %	41,26 %	10 orang	59.600.800	72,00 %	41,26 %		
3.27.04.2.04.01	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah peserta sosialisasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	40 orang	26.468.800			40 orang	26.468.800	orang	793.900	4 orang	18.635.000						40 orang	19.428.900	100,00 %	73,40 %	40 orang	19.428.900	100,00 %	73,40 %	DKPP	
3.27.04.2.04.02	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan pengendalian pemotongan betina produktif yang dilaksanakan	12 kali	79.332.000			12 kali	79.332.000	3 kali	3.500.000	3 kali	8.050.000						6 kali	11.550.000	50,00 %	14,56 %	6 kali	11.550.000	50,00 %	14,56 %	DKPP	
3.27.04.2.04.03	3	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Jumlah unit usaha PAH yang mendapatkan monev NKV	15 unit	8.047.490			15 unit	8.047.490	3 unit	1.543.900	5 unit	2.780.000						8 unit	4.323.900	53,33 %	53,73 %	8 unit	4.323.900	53,33 %	53,73 %	DKPP	
3.27.04.2.04.04	4	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sampel PAH yang diuji laboratorium mikroba	60 sampel	30.588.000			60 sampel	30.588.000	4 sampel	19.828.000	8 sampel	4.470.000						48 sampel	24.298.000	80,00 %	79,44 %	48 sampel	24.298.000	80,00 %	79,44 %	DKPP	
3.27.04.2.05			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Cakupan Penerapan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	75 %	89.235.890			75 %	89.235.890	0	4.000.000	0	6.000.000					0 %	10.000.000	0,00 %	11,21 %	75 %	10.000.000	100%	11,21 %		
3.27.04.2.01	1	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan peningkatan kesejahteraan hewan	80 orang	89.235.890			80 orang	89.235.890	orang	4.000.000	orang	6.000.000						0 orang	10.000.000	0,00 %	11,21 %	0 orang	10.000.000	0,00 %	11,21 %	DKPP	
					Rata-rata capaian kinerja (%)					50,00%	14,74%	50,00%	28,94%						50,00%	44,23%	50,00 %	44,23 %	50,00%	44,23%	50,00 %	44,23 %		
					Predikat kinerja					SR	SR	SR	SR						SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR		

3.27.06	1	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah usaha pengolahan hasil peternakan bersertifikat BPOM	5 unit	269.100.000			5 unit	269.100.000	unit	0	unit	66.633.750				0 unit	66.633.750	0,00%	24,76%	0 unit	66.633.750	0%	24,76%		
3.27.06.2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penerapan hasil pembinaan/ pelatihan usaha peternakan dan usaha hasil peternakan	65 %	269.100.000			65 %	269.100.000	0 0	0	65 %	66.633.750				65 %	66.633.750	100%	24,76%	65 %	66.633.750	100%	24,76%		
3.27.06.2.01.03	1	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah masyarakat yang diberikan pembinaan tentang usaha peternakan dan usaha hasil peternakan	520 orang	269.100.000			520 orang	269.100.000	orang	0	120 orang	66.633.750				120 orang	66.633.750	23,08%	24,76%	120 orang	66.633.750	23,08%	24,76%	DKPP	
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00%	0,00%	0,00%	24,76%				0,00%	24,76%	0,00%	24,76%	0,00%	24,76%	0,00%	24,76%		
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR				SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									21.194.091.198			1.634.216.180						5.415.993.937								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)									44,44%	7,71%	42,59%	17,56%				48,15%	25,55%	48,15%	23,06%	48,15%	23,06%	48,15%	23,06%			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)									SR	SR	SR	SR				SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Jadwal pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan *time schedule* yang telah ditentukan

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Kegiatan pelatihan yang melibatkan masyarakat terkendala pandemik COVID-19

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *time schedule* yang telah ditetapkan; kegiatan yang melibatkan masyarakat dialihkan ke pertemuan daring jika memungkinkan

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :



### BAB III

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Perubahan Anggaran Belanja tahun 2021 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri ditampilkan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja tahun 2021

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>14.189.981.838</b>	<b>20.924.181.965</b>	<b>6.734.200.127</b>
	- Belanja Pegawai	7.363.981.288	7.283.537.400	(80.443.888)
	- Belanja Barang dan Jasa	4.671.000.550	5.010.144.565	339.144.015
	- Belanja Hibah	2.155.000.000	2.845.000.000	690.000.000
	- Belanja Bantuan Sosial	-	5.785.500.000	5.785.500.000
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>2.604.109.360</b>	<b>1.353.971.345</b>	<b>(1.250.138.015)</b>
	- Belanja Peralatan dan Mesin	2.092.399.360	884.252.445	(1.276.385.515)
	- Belanja Gedung dan Bangunan	511.710.000	437.957.500	(73.752.500)
	- Belanja Aset Tetap Lainnya	-	100.000.000	100.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>16.794.091.198</b>	<b>22.278.153.310</b>	<b>5.484.062.112</b>

Adapun penjelasan dari tabel 3.1 adalah sebagai berikut :

#### 1. BELANJA OPERASI

- Pengurangan anggaran belanja pegawai sebesar Rp 80.443.888,00 karena penyesuaian gaji dan tunjangan PNS serta pengurangan belanja jasa tenaga kontrak dokter hewan RPH dan tenaga administrasi kantor yang tidak terserap.
- Penambahan anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp 339.144.015,00 untuk kegiatan intervensi penanganan stunting dan mendukung Layanan Dukungan Psikososial (LDP) bagi anak-anak yatim, piatu dan yatim piatu karena Covid-19 berupa support paket pangan protein hewani sebanyak 1000 paket. Selain itu ada penambahan anggaran untuk kegiatan pendukung pengembangan Korporasi Desa Sapi berupa pelatihan bagi 5 (lima) kelompok ternak serta pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) ASN menindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
- Penambahan belanja hibah sebesar Rp 690.000.000,00 berbentuk hibah uang untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat (kelompok ternak) dalam rangka pengembangan peternakan. Terdapat 8 (delapan) kelompok ternak sapi dan kambing yang direncanakan mendapatkan hibah uang pengembangan peternakan melalui P-APBD Tahun 2021.
- Penambahan belanja bantuan sosial stimulus bagi 1.995 peternak skala kecil terdampak pandemi Covid-19 dengan nilai total Rp 5.785.500.000,00.

## **2. BELANJA MODAL**

Pengurangan anggaran belanja modal sebesar Rp 1.250.138.015,00 disebabkan adanya pergeseran alokasi belanja modal peralatan Rumah Potong Hewan (RPH) yaitu blastfreezer, cold storage, dan incinerator serta belanja modal perlengkapan kantor menjadi belanja kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Dalam rangka mendukung visi misi Bupati Kediri dalam Peningkatan Investasi dan Daya Saing Produk Unggulan berbasis Sumber Daya Lokal dan Penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan *Artificial Intelligence* serta salah satu sarana untuk pengambilan kebijakan di bidang pangan dan peternakan, dianggarkan belanja modal *software/ website* informasi pangan dan peternakan pada P-APBD tahun 2021.

Adapun rincian perubahan anggaran per program kegiatan tahun 2021 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2021								SUMBER DANA
				KELOMPOK SASARAN		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU ANGGARAN (Rp)			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah				100%	100%	9.334.382.053	8.982.611.575	(351.770.478)	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu				100%	100%	16.417.560	11.057.560	(5.360.000)	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	program dan kegiatan DKPP	program dan kegiatan DKPP	DKPP	5 dokumen	5 dokumen	11.246.410	8.566.410	(2.680.000)	DAU
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	kinerja DKPP	kinerja DKPP	DKPP	8 dokumen	3 dokumen	5.171.150	2.491.150	(2.680.000)	DAU
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%	100%	8.047.130.758	7.842.626.470	(204.504.288)	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	administrasi keuangan DKPP	administrasi keuangan DKPP	DKPP	1638 OB	1664 OB	7.065.401.288	6.938.463.400	(126.937.888)	DAU
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen pelaksanaan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen pelaksanaan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	administrasi keuangan DKPP	administrasi keuangan DKPP	DKPP	48 dokumen	48 dokumen	702.537.970	572.361.570	(130.176.400)	DAU
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang diberikan honorarium	Jumlah dokumen pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	administrasi keuangan DKPP	administrasi keuangan DKPP	DKPP	120 OB	12 dokumen	273.708.000	329.802.000	56.094.000	DAU
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	administrasi keuangan DKPP	administrasi keuangan DKPP	DKPP	2 laporan	2 laporan	1.999.500	1.999.500	-	DAU
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang disusun		administrasi keuangan DKPP	administrasi keuangan DKPP	DKPP	2 dokumen		3.484.000	-	(3.484.000)	DAU

III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100%	100%	15.644.000	7.244.000	(8.400.000)	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pejabat penatausahaan barang dan pengurus barang yang diberikan honorarium	Jumlah pejabat pengelola barang yang diberikan honorarium	pejabat penatausahaan barang; pengurus barang	pengurus barang	DKPP	2 orang	2 orang	15.644.000	7.244.000	(8.400.000)	DAU
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100%	100%	18.860.000	5.860.000	(13.000.000)	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti aparatur	Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti aparatur	aparatur DKPP	aparatur DKPP	Dalam dan Luar Kabupaten Kediri	5 kegiatan	5 kegiatan	18.860.000	5.860.000	(13.000.000)	DAU
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100%	100%	768.410.010	635.350.795	(133.059.215)	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dokumen pelaksanaan penyediaan instalasi listrik dan penerangan	Jumlah dokumen pelaksanaan penyediaan instalasi listrik dan penerangan	administrasi kantor DKPP	administrasi kantor DKPP	Kabupaten Kediri	4 dokumen	4 dokumen	21.048.830	21.048.830	-	DAU
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dan dipelihara	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dan dipelihara	administrasi kantor DKPP	administrasi kantor DKPP	Kabupaten Kediri	113 unit	117 unit	181.903.770	182.788.955	885.185	DAU
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	administrasi kantor DKPP	administrasi kantor DKPP	Kabupaten Kediri	95 unit	95 unit	188.527.420	180.141.020	(8.386.400)	DAU
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah rapat koordinasi, rapat staf dan rapat dinas yang dilaksanakan	Jumlah rapat koordinasi, rapat staf dan rapat dinas yang dilaksanakan	administrasi kantor DKPP	administrasi kantor DKPP	Kabupaten Kediri	48 kali	32 kali	147.156.000	92.880.000	(54.276.000)	DAU
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dokumen pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	administrasi kantor DKPP	administrasi kantor DKPP	DKPP	12 dokumen	12 dokumen	69.663.990	69.663.990	-	DAU
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	administrasi kantor DKPP	administrasi kantor DKPP	DKPP	1119 eksemplar	1119 eksemplar	3.828.000	3.828.000	-	DAU
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi kelembagaan di dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	Jumlah koordinasi dan konsultasi kelembagaan di dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	administrasi kantor DKPP	administrasi kantor DKPP	Dalam dan Luar Kabupaten Kediri	350 kali	160 kali	156.282.000	85.000.000	(71.282.000)	DAU

<b>VI</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>240.957.500</b>	<b>40.957.500</b>	
1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah kanopi gedung kantor yang diadakan	Jumlah pengadaan kanopi dan rehab gedung TTI Center yang diadakan	gedung kantor	gedung kantor	Pare	1 paket	2 paket	200.000.000	240.957.500	40.957.500	DAU
<b>VII</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>215.119.725</b>	<b>169.315.250</b>	<b>(45.804.475)</b>	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen pelaksanaan penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen pelaksanaan penyediaan Jasa Surat Menyurat	administrasi penunjang kantor	administrasi penunjang kantor	DKPP	4 dokumen	4 dokumen	2.322.500	4.300.000	1.977.500	DAU
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dokumen pelaksanaan penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dokumen pelaksanaan penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	administrasi penunjang kantor	administrasi penunjang kantor	Kabupaten Kediri	12 dokumen	12 dokumen	187.797.225	125.015.250	(62.781.975)	DAU
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa publikasi yang digunakan	Jumlah jasa Pelayanan Umum Kantor yang digunakan	administrasi penunjang kantor	administrasi penunjang kantor	Kabupaten Kediri	5 kali	5 paket	25.000.000	40.000.000	15.000.000	DAU
<b>VIII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>52.800.000</b>	<b>52.800.000</b>	<b>-</b>	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dokumen pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional serta penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah dokumen pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional serta penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/ operasional	kendaraan dinas/ operasional	kendaraan dinas/ operasional	DKPP	12 dokumen	4 dokumen	32.800.000	32.800.000	-	DAU
2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	gedung kantor	gedung kantor	Tarakan	1 gedung	1 gedung	20.000.000	20.000.000	-	DAU
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	<b>Cakupan pemanfaatan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan</b>	<b>Cakupan pemanfaatan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>51.086.000</b>	<b>50.526.000</b>	<b>(560.000)</b>	
<b>I</b>	<b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah rumusan kebijakan ketahanan pangan yang ditetapkan</b>	<b>Jumlah rumusan kebijakan ketahanan pangan yang ditetapkan</b>				<b>1 rumusan</b>	<b>1 rumusan</b>	<b>51.086.000</b>	<b>50.526.000</b>	<b>(560.000)</b>	

1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah rapat dan sidang penyusunan rumusan kebijakan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Penyediaan infrastruktur logistik yang dilaksanakan	masyarakat	masyarakat	Kabupaten Kediri	4 kali	2 unit	51.086.000	50.526.000	(560.000)	DAU
C	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Koefisien variasi harga pangan utama	Koefisien variasi harga pangan utama				10%	10%	653.402.650	1.064.902.650	411.500.000	
		Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan				94,4	94,4				
		Jumlah cadangan pangan masyarakat	Jumlah cadangan pangan masyarakat				100 ton	100 ton				
I	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah penyaluran pangan pokok ke Toko Tani Indonesia	Jumlah penyaluran pangan pokok ke Toko Tani Indonesia				200 ton	200 ton	231.753.800	338.253.800	106.500.000	
1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah petugas survey harga dan NBM yang diberikan pelatihan	Jumlah petugas survey harga dan NBM yang diberikan pelatihan; Jumlah aplikasi sistem informasi pangan yang dibangun	petugas data NBM; masyarakat	petugas data NBM; masyarakat	Kabupaten Kediri	26 orang	26 orang; 1 aplikasi	100.655.500	200.655.500	100.000.000	DAU
2	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah anggota poktan/ gapoktan yang diberikan pelatihan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat	Jumlah anggota poktan/ gapoktan yang diberikan pelatihan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat	gapoktan LUPM	gapoktan LUPM	Kabupaten Kediri	120 orang	120 orang	131.098.300	137.598.300	6.500.000	DAU
II	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah lumbung pangan yang dikelola masyarakat	Jumlah lumbung pangan yang dikelola masyarakat				11 unit	11 unit	111.415.250	111.415.250	-	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan pengembangan ketersediaan dan cadangan pangan	Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan pengembangan ketersediaan dan cadangan pangan	Kelompok tani/ kelompok ternak	Kelompok tani/ kelompok ternak	Kabupaten Kediri	170 orang	170 orang	111.415.250	111.415.250	-	DAU
III	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan B2SA	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan B2SA				4 unit	6 kegiatan	310.233.600	615.233.600	305.000.000	

1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok yang mendapatkan program P2L DAK Non Fisik ; Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok yang mendapatkan program P2L DAK Non Fisik ; Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	ibu rumah tangga, kelompok wanita tani, PKK, pelaku usaha pangan olahan	ibu rumah tangga, kelompok wanita tani, PKK, pelaku usaha pangan olahan, anak yatim, piatu dan yatim piatu karena Covid-19	Kabupaten Kediri	2 kelompok; 160 orang	2 kelompok; 1.212 orang	310.233.600	615.233.600	305.000.000	DAU; DAK Non Fisik
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>Jumlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang disusun</b>	<b>Jumlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang disusun</b>				<b>1 peta</b>	<b>1 peta</b>	<b>92.734.750</b>	<b>86.644.750</b>	<b>(6.090.000)</b>	
<b>I</b>	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah desa rentan rawan pangan yang ditangani</b>	<b>Jumlah desa rentan rawan pangan yang ditangani</b>				<b>2 desa</b>	<b>2 desa</b>	<b>92.734.750</b>	<b>86.644.750</b>	<b>(6.090.000)</b>	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan pencegahan dan penanganan kerawanan pangan	Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan pencegahan dan penanganan kerawanan pangan	kelompok tani, kelompok ternak	kelompok tani, kelompok ternak		80 orang	80 orang	92.734.750	86.644.750	(6.090.000)	DAU
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>Persentase keamanan pangan segar</b>	<b>Persentase keamanan pangan segar</b>				<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>377.098.000</b>	<b>377.098.000</b>	<b>-</b>	
<b>I</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pelaku usaha pangan segar yang diberikan pengawasan keamanan pangan</b>	<b>Jumlah pelaku usaha pangan segar yang diberikan pengawasan keamanan pangan</b>				<b>200 orang</b>	<b>200 orang</b>	<b>377.098.000</b>	<b>377.098.000</b>	<b>-</b>	
1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pangan segar yang mendapatkan pelatihan keamanan pangan segar	Jumlah pelaku usaha pangan segar yang mendapatkan pelatihan keamanan pangan segar	pelaku usaha pangan segar	pelaku usaha pangan segar	Kabupaten Kediri	80 orang	80 orang	71.443.000	74.814.900	3.371.900	DAU
2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pangan segar yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi sertifikasi keamanan pangan segar	Jumlah pelaku usaha pangan segar yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi sertifikasi keamanan pangan segar	pelaku usaha pangan segar	pelaku usaha pangan segar	Kabupaten Kediri	50 orang	50 orang	169.495.000	69.835.000	(99.660.000)	DAU
3	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pangan segar yang diuji	Jumlah sampel pangan segar yang diuji	pangan segar	pangan segar	Kabupaten Kediri; Surabaya	30 sampel	30 sampel	92.160.000	140.000.000	47.840.000	DAU

4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat rapid test kit keamanan pangan segar yang diadakan	Jumlah alat rapid test kit keamanan pangan segar yang diadakan	masyarakat	masyarakat	Kabupaten Kediri	1 paket	2 paket	44.000.000	92.448.100	48.448.100	DAU
E	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Produktivitas ternak</b>	<b>Produktivitas ternak</b>						<b>2.771.978.420</b>	<b>9.449.628.420</b>	<b>6.677.650.000</b>	
		- Service per Conception	- Service per Conception				1,3	1,3				
		- Calving Interval	- Calving Interval				14 bulan	14 bulan				
		- Conception Rate	- Conception Rate				80%	80%				
		<b>Populasi ternak</b>	<b>Populasi ternak</b>									
		- Sapi potong	- Sapi potong				233.035 ekor	233.035 ekor				
		- Sapi perah	- Sapi perah				10.797 ekor	10.797 ekor				
		- Kambing	- Kambing				146.147 ekor	146.147 ekor				
		- Domba	- Domba				49.799 ekor	49.799 ekor				
- Ayam buras	- Ayam buras				1.271.951 ekor	1.271.951 ekor						
	<b>Jumlah SPR yang terbentuk</b>	<b>Jumlah SPR yang terbentuk</b>				<b>8 SPR</b>	<b>8 SPR</b>					
I	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>35.080.000</b>	<b>5.842.699.850</b>	<b>5.807.619.850</b>	
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung peternakan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung peternakan; Jumlah peternak yang mendapatkan bansos stimulus	peternak, kelompok ternak	peternak, kelompok ternak	Kabupaten Kediri	1 unit	1 unit; 1.989 peternak	35.080.000	5.842.699.850	5.807.619.850	DAU
II	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>	<b>Cakupan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan</b>	<b>Cakupan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2.652.183.020</b>	<b>3.392.631.990</b>	<b>740.448.970</b>	
1	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah kelompok yang menerima hibah dalam rangka peningkatan kualitas SDG Hewan; Jumlah pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas SDG hewan yang dilaksanakan	Jumlah kelompok yang menerima hibah dalam rangka peningkatan kualitas SDG Hewan; Jumlah pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas SDG hewan yang dilaksanakan	peternak, kelompok ternak, SPR	peternak, kelompok ternak, SPR	Kabupaten Kediri	26 kelompok; 13 unit	34 kelompok; 11 unit	2.386.559.490	3.130.099.490	743.540.000	DAU
2	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah event dalam rangka Pemanfaatan SDG Hewan yang dilaksanakan	Jumlah event dalam rangka Pemanfaatan SDG Hewan yang dilaksanakan	masyarakat, pelaku usaha produk olahan peternakan, anak sekolah	pelaku usaha produk olahan peternakan, masyarakat isolasi mandiri karena covid-19	Kabupaten Kediri	4 unit	3 unit	265.623.530	262.532.500	(3.091.030)	DAU



III	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan/ pelatihan pakan dan produksi peternakan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan/ pelatihan peningkatan mutu pakan dan produksi peternakan				40 orang	100 orang	84.715.400	214.296.580	129.581.180	
1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah kegiatan pengawasan dan peningkatan mutu pakan yang dilakukan	Jumlah kegiatan pengawasan dan peningkatan mutu pakan dan bibit ternak yang dilaksanakan	peternak, kelompok ternak	peternak, kelompok ternak	Kabupaten Kediri	3 unit	5 unit	84.715.400	214.296.580	129.581.180	DAU
<b>F</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Cakupan pemanfaatan prasarana peternakan dan kesehatan hewan yang tersedia</b>	<b>Cakupan pemanfaatan prasarana peternakan dan kesehatan hewan yang tersedia</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2.151.369.900</b>	<b>1.029.538.600</b>	<b>(1.121.831.300)</b>	
<b>I</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah prasarana pertanian yang dibangun</b>	<b>Jumlah prasarana pertanian yang dibangun</b>				<b>3 unit</b>	<b>3 unit</b>	<b>2.129.077.000</b>	<b>1.007.665.700</b>	<b>(1.121.411.300)</b>	
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah prasarana dan peralatan RPH yang diadakan	Jumlah prasarana dan peralatan RPH yang diadakan dan dipelihara	Rumah Potong Hewan	Rumah Potong Hewan	Pare, Wates	22 unit	21 unit	1.987.077.000	888.825.700	(1.098.251.300)	DAU
2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pendukung peternakan yang dibangun	Jumlah prasarana pendukung peternakan yang dibangun	kelompok ternak, demplot kambing	kelompok ternak, demplot kambing	Kabupaten Kediri	2 unit	2 unit	142.000.000	118.840.000	(23.160.000)	DAU
<b>II</b>	<b>Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum</b>	<b>Jumlah kelompok ternak yang mendapatkan pelatihan/ pembinaan pengembangan ternak</b>	<b>Jumlah kelompok ternak yang mendapatkan pelatihan/ pembinaan pengembangan ternak</b>				<b>2 kelompok</b>	<b>2 kelompok</b>	<b>22.292.900</b>	<b>21.872.900</b>	<b>(420.000)</b>	
1	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan / pembinaan pengembangan ternak	Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan / pembinaan pengembangan ternak	peternak, kelompok ternak	peternak, kelompok ternak	Kabupaten Kediri	40 orang	40 orang	22.292.900	21.872.900	(420.000)	DAU
<b>G</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>Persentase kasus kesehatan hewan dan kesmavet yang ditangani</b>	<b>Persentase kasus kesehatan hewan dan kesmavet yang ditangani</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.092.939.425</b>	<b>993.173.315</b>	<b>(99.766.110)</b>	
		<b>Jumlah unit usaha produk hewan yang tersertifikasi NKV</b>	<b>Jumlah unit usaha produk hewan yang tersertifikasi NKV</b>				<b>5 unit</b>	<b>5 unit</b>				
<b>I</b>	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah kasus penyakit hewan menular pada ternak yang terdeteksi</b>	<b>Jumlah kasus penyakit hewan menular pada ternak yang terdeteksi</b>				<b>12 kasus</b>	<b>12 kasus</b>	<b>223.968.790</b>	<b>195.858.840</b>	<b>(28.109.950)</b>	
1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah peternak yang diberikan bimtek peningkatan kesehatan hewan	Jumlah peternak yang diberikan bimtek peningkatan kesehatan hewan	peternak	peternak	Kabupaten Kediri	90 orang	90 orang	223.968.790	195.858.840	(28.109.950)	DAU

II	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Produk Asal Hewan yang lolos uji mikroba	Persentase Produk Asal Hewan yang lolos uji mikroba				70%	70%	23.469.700	21.289.700	(2.180.000)	
1	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah peserta sosialisasi Produk Asal Hewan	Jumlah peserta sosialisasi Produk Asal Hewan	masyarakat	masyarakat	Kabupaten Kediri	40 orang	40 orang	23.469.700	21.289.700	(2.180.000)	DAU
III	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan terpadu	Jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan terpadu				2.600 ekor	2.600 ekor	611.828.755	623.181.295	11.352.540	
1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah perlengkapan labkeswan yang diadakan	Jumlah perlengkapan labkeswan yang diadakan	laboratorium kesehatan hewan, Pukeswan	laboratorium kesehatan hewan, Pukeswan	Kabupaten Kediri	3 paket	4 paket	61.491.025	127.131.025	65.640.000	DAU
2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan medik veteriner yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan medik veteriner yang dilaksanakan	peternak, petugas medik dan paramedik veteriner, petugas IB, masyarakat	peternak, petugas medik dan paramedik veteriner, petugas IB, masyarakat	Kabupaten Kediri	3 unit	3 unit	550.337.730	496.050.270	(54.287.460)	DAU
IV	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pelaku usaha Produk Asal Hewan yang mendapatkan pembinaan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesmavet	Jumlah pelaku usaha Produk Asal Hewan yang mendapatkan pembinaan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesmavet				150 orang	150 orang	144.436.290	113.792.590	(30.643.700)	
1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah peserta sosialisasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah peserta sosialisasi Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	unit usaha produk hewan	unit usaha produk hewan	Kabupaten Kediri	40 orang	80 orang	26.468.800	43.436.300	16.967.500	DAU
2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan pengendalian pemotongan betina produktif yang dilaksanakan	Jumlah pengawasan pengendalian pemotongan betina produktif yang dilaksanakan	produk hewan	produk hewan	Kabupaten Kediri	12 kali	12 kali	79.332.000	32.120.000	(47.212.000)	DAU
3	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Jumlah unit usaha PAH yang mendapatkan monev NKV	Jumlah unit usaha PAH yang mendapatkan monev NKV	unit usaha produk hewan	unit usaha produk hewan	Kabupaten Kediri	15 unit	15 unit	8.047.490	7.998.290	(49.200)	DAU
4	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sampel PAH yang diuji laboratorium mikroba	Jumlah sampel PAH yang diuji laboratorium mikroba	tempat penampung susu, KUD sapi perah produk asal hewan di pasar tradisional,	tempat penampung susu, KUD sapi perah produk asal hewan di pasar tradisional,	Kabupaten Kediri	60 sampel	60 sampel	30.588.000	30.238.000	(350.000)	DAU

V	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Cakupan Penerapan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Cakupan Penerapan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan				75%	75%	89.235.890	39.050.890	(50.185.000)	
1	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan peningkatan kesejahteraan hewan	Jumlah lokasi pengawasan penyembelihan hewan Qurban yang dilaksanakan	jagal / takmir	tempat penyembelihan hewan Qurban	Kabupaten Kediri	80 orang	26 kecamatan	89.235.890	39.050.890	(50.185.000)	DAU
H	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>Jumlah usaha pengolahan hasil peternakan terfasilitasi sertifikat BPOM</b>	<b>Jumlah usaha pengolahan hasil peternakan terfasilitasi sertifikat BPOM</b>				<b>5 unit</b>	<b>5 unit</b>	<b>269.100.000</b>	<b>261.430.000</b>	<b>(7.670.000)</b>	
I	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan penerapan hasil pembinaan/ pelatihan usaha peternakan dan usaha hasil peternakan</b>	<b>Cakupan penerapan hasil pembinaan/ pelatihan usaha peternakan dan usaha hasil peternakan</b>				<b>65%</b>	<b>65%</b>	<b>269.100.000</b>	<b>261.430.000</b>	<b>(7.670.000)</b>	
1	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah masyarakat yang diberikan pembinaan tentang usaha peternakan dan usaha hasil peternakan	Jumlah masyarakat yang diberikan pembinaan tentang usaha peternakan dan usaha hasil peternakan	pelaku usaha olahan hasil peternakan; peternak, masyarakat	pelaku usaha olahan hasil peternakan; peternak, masyarakat	Kabupaten Kediri	520 orang	520 orang	269.100.000	261.430.000	(7.670.000)	DAU
<b>TOTAL</b>									<b>16.794.091.198</b>	<b>22.278.153.310</b>	<b>5.484.062.112</b>	

## BAB IV

### PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri Tahun 2021 ini merupakan rancangan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Kediri serta target dan sasaran pembangunan daerah yang dioperasionalkan melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2021. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan rancangan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran P-APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun berjalan. Dengan adanya Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan SKPD terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain. Melalui panduan ini, diharapkan penyelenggaraan program/ kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien sehingga dapat memberikan keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*) yang optimal.

Kediri, - - 2021

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
dan Peternakan Kabupaten Kediri



**TUTIK PURWANINGSIH**

Pembina Tk. I

NIP. 19740807 200312 2 004

BUPATI KEDIRI,

**HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA**